

LAKIP
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan**

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *Good Government* di lingkungan Dinas Perhubungan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja (LKJ) ini juga dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpastipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LKJ ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan dalam melaksanakan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah

Dimasa yang akan datang, kami mengharap masukan, saran dan perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan. Semoga laporan LKJIP ini dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan dapat mendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

SALAKAN, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KAB. BANGGAI KEPULAUAN



YOKO PRANANTORO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19771026 199803 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan/digariskan oleh Pemerintah Banggai Kepulauan, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan atau pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2023 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan tahun 2023-2026, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan menetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang menjadi pedoman dan pengukuran kinerja instansi, yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar APBD sebesar **Rp. 8.246.043.625** yang telah terealisasi sebesar **Rp7.964.057.508** atau setara **(96,58%)** yang terdiri dari 3 Program dengan 12 Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun pertama kegiatan.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Nilai Sakip	B (60-70)	B (68,61)	114,43 %	Sangat Berhasil
2	Jumlah Pelabuhan Laut	13	5	38,46%	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan telah **berhasil** melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis bidang perhubungan. Hal tersebut tercermin dari tingkat capaian kinerja yang dapat dilihat dari nilai rata - rata indikator sasaran sebesar 76,44%. namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Isu Strategis.....	12
F. Sistematika Penyajian	12
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	23
BAB 4 PENUTUP	27
A. Kesimpulan.....	27

BAB 1

PENDAHULUAN

DINAS PERHUBUNGAN



BAB 1

PENDAHULUAN

DINAS PERHUBUNGAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan adanya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan di setiap unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini terselesaikan juga sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan selama tahun 2024. Sehingga dalam penyusunannya selalu mengupayakan penyampaian data dengan spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam sector perhubungan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimana salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, sebagai wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan komprehensif dalam suatu kerangka Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan siklus tersebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi misi tujuan dan sasaran secara selaras dan berkesinambungan setiap tahunnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan merupakan sebuah bentuk laporan: kinerja yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Selama satu tahun anggaran 2024
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dimasa yang akan datang.
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik akuntabel transparan dan terpercaya yang pelaksanaannya menitik beratkan pada keterpenuhan aspek efisien dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi pemerintah

C. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pehubungan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan diatas maka, tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Sebagai berikut :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas dan angkutan, prasarana serta pengembangan dan keselamatan

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini

Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Non Apartur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf. Berdasarkan data Kepegawaian sampai dengan akhir Tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan berjumlah 120 orang, terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 79 Orang Tenaga Kontrak. Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjuruan (posisi Desember 2024), pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan per Desember Tahun 2024

NO	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Sekertaris	Pembina, IV/b	1
3	Kepala Bidang	Pembina, IV/a	2
		Penata Tkt I, III/d	1
4	Kasubag/Kasie/UPT	Penata Tkt I, III/d	4
		Penata, III/c	5
5	Staf	Penata Muda, III/a	6
		Pengatur Tkt I, II/d	2
		Pengatur, II/c	6
		Pengatur Muda Tkt I, II/b	2
		PPPK Gol VII	1
	Jumlah		31

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

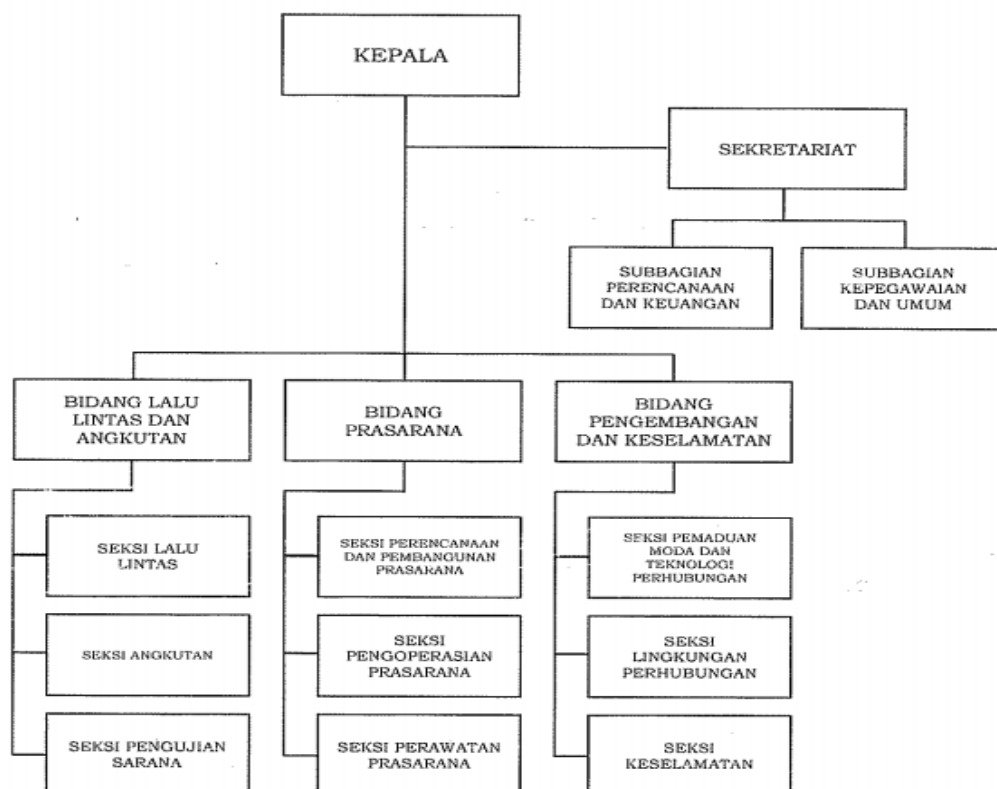
NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata-3	-	-	-
2	Strata-2	2	-	2
3	Strata-1	12	1	13
4	Diploma-4	2	2	4
5	Diploma-3	5	1	6
6	Diploma-2	1	1	2
7	Diploma-1	-	-	-
8	SMA	3	1	4
9	SMP	-	-	-
10	SD	-	-	-
	Jumlah Total			31
	Pegawai Kontrak			79

Dalam melaksanakan serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas dibantu 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

- b. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - c. Seksi Perawatan Prasarana;
- 4. Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengujian Sarana.
- 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - c. Seksi Keselamatan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



E. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait Sektor Perhubungan, berdasarkan faktor faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada. Isu ini adalah akumulasi permasalahan pelayanan yang sering dihadapi dan peluang-peluang yang ada, maka beberapa isu strategis pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Penguatan Konektifitas sistem Transportasi Darat dan Laut
2. Revitalisasi sistem Transportasi Perkotaan dan Pedesaan
3. Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ
4. Penguatan Sistem Pengendalian Keselamatan Transportasi Darat maupun Laut atau penyeberangan lainnya.
5. Modernisasi Sistem Pelayanan Transportsai Darat dan Laut
6. Optimalisasi Penyelenggaran hari libur Nasional.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan selama satu tahun di tahun 2024. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Banggai Kepulauan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

A. Rencana Strategis

Visi merupakan gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan tentang apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Visi dapat juga disebut sebagai pandangan jangka panjang pemerintah daerah yang menjadi penunjang bagi kemajuan pembangunan. Seperti yang terutan dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2005- 2025 bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu "***Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata***".

Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maka ditetapkan beberapa misi yang berfungsi untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya. Adapun misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

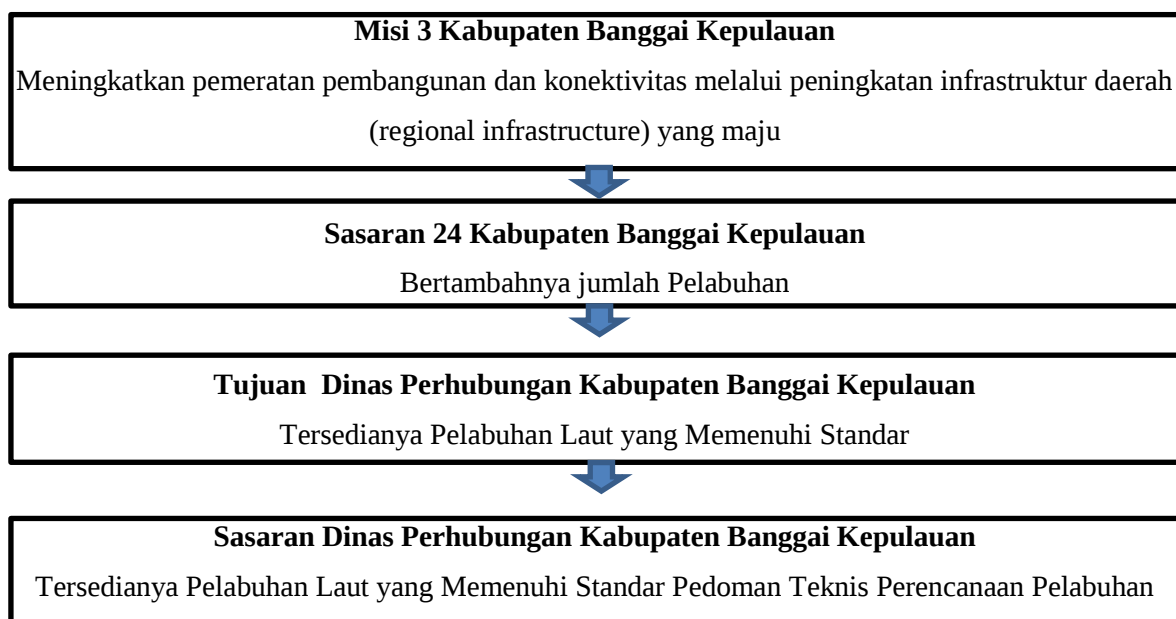
- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani
- b. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness)
- c. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju;
- d. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (social-economy welfare);
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach).

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan Tujuan "**Tersedianya Pelabuhan Laut yang Memenuhi Standar.**" dan "**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**". Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2023-2026.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan sasaran strategis “**Tersedianya Pelabuhan Laut yang Memenuhi Standar Pedoman Teknis Perencanaan Pelabuhan**”, dan “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**”

Keterkaitan RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan





Tujuan dan Sasaran di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- 1) Nilai SAKIP.
- 2) Jumlah Pelabuhan Laut.
- 3) Meningkatnya Konektivitas Perhubungan Antar Wilayah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan telah disusun pada awal tahun anggaran tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun ke - dua dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta anggaran, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B (60-70)

2	Tersedianya Pelabuhan Laut yang Memenuhi Standar Pedoman Teknis Perencanaan Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Laut	13
---	---	-----------------------	----

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung oleh 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan, 7 (Tujuh) kegiatan yang terangkum dalam 3 (dua) program sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp 4.180.233.625
2	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.478.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.478.000
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.627.400.000
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.895.461.000
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (TPP)	Rp 731.939.000
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25.000.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25.000.000
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 724.254.905
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11.999.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 170.999.905,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 195.000.000,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10.054.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 12.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 324.202.000,00

16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 93.400.000
17	Pengadaan Meubel	Rp 90.000.000
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.400.000
19	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp 485.200.720
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.992.000
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 35.378.970
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 444.829.750
23	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 191.500.000
24	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Rp 150.000.000
25	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operaasional atau lapangan	Rp 25.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 16.500.000
27	Penataan Organisasi	Rp 21.000.000
28	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Rp 21.000.000
29	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2.562.210.000,00
30	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Rp 2.225.620.000
31	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten kota	Rp 1.015.000.000
32	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Rp 410.620.000
33	Rehabiliatsi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Rp 800.000.000
34	Pengelolaan Terminal Tipe C	Rp 247.000.000
35	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal	Rp 247.000.000
36	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 11.600.000
37	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 11.600.000

38	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	Rp 77.990.000
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota	Rp 77.990.000
40	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 1.503.600.000
41	Pembangunan , penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan Lokal	Rp 1.503.600.000
42	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan lokal	Rp 830.000.000
43	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 80.000.000
44	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 593.600.000
Jumlah		Rp 8.246.043.625



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih. (Good Governance & Clean Government) dan Terwujudnya Pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata.” digunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran stratejik yang terkait dengan Visi Kab. Banggai Kepulauan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

NO	Nilai	Kriteria
1	85 -100%	Sangat Berhasil
2	70 – 84%	Berhasil
3	55 – 69%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

Maka gambaran capaian predikat nilai IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, rata-rata pada predikat nilai capaian berhasil. secara rinci capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Nilai Sakip	B (60-70)	B (68,61)	100 %	Sangat Berhasil
3	Jumlah Pelabuhan Laut	13	5	38,46%	Tidak Berhasil

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Sakip.
- Berdasarkan Tabel diatas, Capaian realisasi Nilai sakip pada tahun 2024 sebesar B (68,61) atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar B (60-70). Hal ini menunjukkan bahwa

indikator kinerja Nilai SAKIP sesuai dengan realisasi target yang ditentukan dengan nilai rata rata pencapaian sebesar 100% maka sasaran berada pada kategori “Sangat Berhasil”.

Tabel Evaluasi Data Kinerja SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	20,20
2	Pengukuran Kinerja	30	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,61
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hal – Hal yang mempengaruhi nilai SAKIP :

1. Implementasi kebijakan terkait penyusunan SAKIP terutama pada saat penyusunan RENSTRA masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mempengaruhi pembuatan dokumen perencanaan yang lain
2. Masih minimnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengerjaan dokumen SAKIP karena kurangnya jumlah sumber daya manusia serta bimbingan teknis dalam pengerjaan dokumen SAKIP.

Solusi :

1. Memberikan bimbingan teknis kepada organisasi perangkat daerah terkait penyusunan dokumen – dokumen pendukung SAKIP agar dapat diselaraskan formatnya. Mengadakan sosialisasi terkait bagaimana tata cara penyusunan dokumen – dokumen pendukung SAKIP.
2. Bupati selaku kepala daerah hendaknya memberikan apresiasi dan sanksi kepada masing masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan kinerja dalam penyusunan dokumen SAKIP, sebagai bentuk penilaian kinerja instansi yang bersangkutan

2) Jumlah Pelabuhan Laut

Berdasarkan Tabel diatas, Capaian realisasi Jumlah Pelabuhan Laut. pada tahun 2024 sebesar 5 atau 38,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar 13. Hal ini menunjukkan indikator kinerja Jumlah Pelabuhan Laut belum sesuai dengan target yang ditentukan dengan nilai pencapaian sebesar 38,46% maka sasaran berada pada kategori ini yakni “Tidak Berhasil”.

Hal – Hal Yang Mempengaruhi Jumlah Pelabuhan Laut :

1. Kurangnya anggaran baik pembangunan maupun rehabilitasi pelabuhan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga menghambat proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi sehingga tidak sesuai dengan target kinerja.

Solusi :

1. Penambahan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan yang ada sehingga tiap tahunnya dapat ditambah jumlah pelabuhan yang ada di Banggai Kepulauan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka merealisasikan target kinerja yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 telah mengalokasikan dana dan merealisasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI KEUANGAN	SISA DANA	REALISASI	
					KEUANGAN %	KEGIATAN %
	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp12.478.000	Rp12.460.000	Rp18.000	99,86%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.627.400.000	Rp2.515.322.769	Rp112.077.231	95,73%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp25.000.000	Rp23.180.000	Rp1.820.000	92,72%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp724.254.905	Rp711.624.347	Rp12.630.558	98,26%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp93.400.000	Rp93.260.000	Rp140.000	99,85%	100%
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp485.200.720	Rp434.349.550	Rp50.851.170	89,52%	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Rp191.500.000	Rp178.257.900	Rp13.242.100	93,09%	100%

	urusan pemerintah daerah					
	Penataan Organisasi	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	100,00%	100%
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Rp2.225.620.000	Rp2.202.598.298	Rp23.021.702	98,97%	100%
	Pengelolaan Terminal Tipe C	Rp247.000.000	Rp247.000.000	Rp0	100,00%	100%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp11.600.000	Rp11.600.000	Rp0	100,00%	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	Rp77.990.000	Rp71.074.644	Rp6.915.356	91,13%	100%
	Pembangunan , penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpang Lokal	Rp1.503.600.000	Rp1.442.330.000	Rp61.270.000	95,93%	100%
	Jumlah	Rp8.246.043.625	Rp7.964.057.508	Rp281.986.117	96,58%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besaran anggaran yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 untuk Dinas perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar **Rp.8.246.043.625** yang telah terealisasi sebesar **Rp.7.964.057.508** atau setara (**96,58%**) dengan demikian terdapat sisa sebesar **Rp.281.986.117**. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar **0,61%** dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar **95,97%**

Dishub Kabupaten Banggai Kepulauan disamping sebagai unsur pelaksana teknis kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di bidang transportasi juga sebagai dinas penghasil yang menunjang kegiatan pembangunan di pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jenis Pendapatan Asli Daerah di sektor perhubungan antara lain :

1. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
2. Reribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
3. Reribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
5. Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang

Capaian Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 513.000.000	Rp404.836.750	(Rp 108.163.250)
	1. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp. 171.000.000	Rp181.462.000	Rp 10.462.000
	2. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000		(Rp 60.000.000)
	3. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp. 2.000.000		(Rp 2.000.000)
	4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Rp. 270.000.000	Rp201.834.750	(Rp 68.165.250)
	5. Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang	Rp. 10.000.000	Rp21.540.000	Rp 11.540.000
Jumlah		Rp. 513.000.000	Rp404.836.750	(Rp 108.163.250)

Target PAD pada tahun 2024 sebesar **Rp.513.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp.404.836.750,-**. Realisasi belum memenuhi target dengan hanya mampu memenuhi capaian sebesar **79%**.





BAB 4

PENUTUP

DINAS PERHUBUNGAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan telah dapat diselenggarakan dengan baik melalui sumber daya yang ada
2. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagian besar telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja yang diharapkan.
3. Pengukuran pencapaian sasaran untuk tahun 2024, dilakukan pada tingkat indicator hasil (outcome) dan beberapa menggunakan indikator keluaran (output) utamanya pada kegiatan administrasi umum. Dari 28 (Dua Puluh Delapan) sub kegiatan, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang terangkum dalam 3 (Tiga) program yang direncanakan tahun 2024 dengan rencana anggaran **Rp8.246.043.625** dan realisasi anggaran sebesar **Rp7.964.057.508** atau **96,58%**
4. Selanjutnya dapat diungkapkan bahwa dalam setiap upaya pencapaian tujuan yang masih terdapat kendala & permasalahan, akan tetapi adanya kendala dan permasalahan tersebut sudah dapat di tekan seminim mungkin, karena semua itu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan perlunya mengefektifkan monitoring dan evaluasi karena itu faktor pendukung yang bisa dimonitor adalah melalui sistem pelaporan.